



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

DUWWI FITRIANA
NIM : 01770423569

JURUSAN DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

RIAU

2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : DUWWI FITRIANA
NIM : 01770423569
PROGRAM STUDI : D-III AKUNTANSI
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DI DESA BUKIT KERIKIL KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA KABUPATEN BENGKALIS

Setelah kami teliti dan memberikan bimbingan sebagaimana mestinya, maka kami berpendapat bahwa laporan ini sudah disetujui

Pekanbaru, 11 Mei 2020

DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
NIP. 19741108 200003 2 004

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA JURUSAN



Dr. Drs. H. Muh. Sa'id H.M. M. Ag. MM
NIP. 19620512 196903 1 003

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
NIP. 19741108 200003 2 004



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama : DuwwiFitriana
 NIM : 01770423569
 ProgramStudi : Diploma III Akuntansi
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : **AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DI DESA BUKIT KERIKIL KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA KABUPATEN BENGKALIS**
 TanggalUjian : Selasa, 19 Mei 2020

PANITIA PENGUJI

KETUA PENGUJI

Dr. Dony Martias, SE, MM
 NIP. 19760306 200710 1004

PENGUJI I

Rimet, SE, MM, Ak, CA
 NIK. 130707 014

PENGUJI II

Dr. Nanda Suryadi, SE, ME
 NIK. 130 717055



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DI DESA BUKIT KERIKIL KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA KABUPATEN BENGKALIS

OLEH : DUWWI FITRIANA

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) tahun 2019 di Desa Bukit Kerikil Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis. Pengumpulan data yang digunakan dengan pengamatan langsung di lapangan dan dengan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif dengan proses transformasi data penelitian dalam bentuk membandingkan teori dan praktek di lapangan untuk dianalisis dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pemerintah Desa Bukit Kerikil telah menyesuaikan pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dengan peraturan yang berlaku. Kemudian dalam Perencanaan dan realisasi Dana Desa cukup sesuai, namun pada saat waktu pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bukit Kerikil belum tertera jelas dalam laporan pertanggungjawaban. Dan selanjutnya dalam program Pembangunan Infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Bukit Kerikil, masyarakat tidak selalu dilibatkan. Rekomendasi untuk penelitian ini adalah harus adanya rincian yang lengkap terkait waktu pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Bukit Kerikil, pemerintah desa Bukit Kerikil harus lebih akuntabel terhadap penyampaian laporan penggunaan anggaran, segala kegiatan pengelolaan Dana Desa harus melibatkan seluruh masyarakat desa hingga evaluasi.

Kata kunci : Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamua'alaikum WR WB

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Yang mana berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Ini dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad saw, yang menjadi suri tauladan bagi umat islam dengan Lafaz *Allahumma Shalli'Ala Muhammad Wa'alaali Muhammad*. Semoga shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya dan semoga kita tergolong kepada orang-orang ahli surga, Aamiin.

Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian tugas akhir guna mendapat gelar Ahli Madya (AMd) pada program Diploma III (DIII) Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang berjudul **“AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DI DESA BUKIT KERIKIL KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA KABUPATEN BENGKALIS”**.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, baik berupa isi maupun cara penyajiannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan isi dari Tugas Akhir ini. Penulis menyadari pula begitu banyak pihak yang terlibat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa banyak kesulitan yang dialami, semua dapat dilewati dengan baik berkat bantuan dan bimbingan orang-orang yang sangat berarti bagi penulis. Penulis juga menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari semua pihak yang telah memberikan motivasi serta dukungan yang sangat berarti, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis secara khusus mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya untuk yang teristimewa yaitu kepada Ibunda LELA dan Ayahanda AHMAD FARIDUL. Terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, do'a dan inspirasi serta dukungan moril maupun materil selama berlangsungnya penulis melaksanakan pendidikan sampai akhir. Dan tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak DR. Drs. H. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak, selaku ketua jurusan Akuntansi Diploma III dan selaku Dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademis yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Ibu Febri Rahmi, SE, M.Sc.,Ak, CA selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Diploma III Akuntansi.
6. Kepada Penguji satu dan penguji dua penulis.
7. Semua Bapak/Ibu dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
8. Buat Saudara-saudara dan orang yang saya sayangi yaitu Kakak Saya Yanda Syari Pohan A.Ma, Abang ipar Saya Ayub Harahap, dan Adik-adik saya Nurhayana, Ahmad Ridho, Aulia Rahmadhani, dan Abang Sugianto.
9. Tidak lupa juga ucapan terimakasih buat teman-teman saya, Yaitu Alfin Saparino A.Md, Robiatul Adawiyah Nasution, Maya Shopia, Sunarsih, Titin Julianti, Rima Wahyu, Nindia, Depi Yanti, Wisma Ramadhina, Siti Anisah serta seluruh teman-teman seperjuangan D3 Akuntansi angkatan 2017 khususnya lokal C, A dan B yang selalu memberikan do'a semangat dan dukungannya untuk penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Bapak Nurdin selaku Kepala Desa, Eko Sarwono selaku Sekretaris Desa, Warsino Aldi selaku Kepala Seksi Pelayanan, Eva Sulinah Selaku Kepala Urusan Keuangan, dan Riatno selaku Kepala Seksi Pemerintahan, yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
11. Semua Pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu penulis menghaturkan permohonan maaf. Penulis juga mengucapkan ribuan terimakasih atas semuanya yang telah diberikan kepada penulis. Semoga segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak akan mendapatkan imbalan pahala dari Allah SWT Aamiin.

Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin.*

Pekanbaru, Maret 2020

Penulis

DUWWI FITRIANA
Nim: 01770423569

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.6 Metode pengumpulan Data	11
1.7 Teknik Analisa Data.....	11
1.8 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II GAMBARAN UMUM	
2.1 Sejarah Desa.....	13
2.2 Penduduk.....	13
2.3 Infrastruktur.....	14
2.4 Pendidikan.....	14
2.5 Industri Rumah Tangga.....	15
2.6 Keadaan Ekonomi	15
2.7 Potensi Umum.	17
2.8 Susunan Organisasi Pemerintahan	18
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Tinjauan Teori	
3.1.1 Pengertian Dan Tipologi Desa	20
3.1.2 Undang-Undang Tentang Desa	21
3.1.3 Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Desa	27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.4 Siklus Pengelolaan Dana Desa	27
3.1.5 Azaz Pengelolaan Keuangan Desa	29
3.1.6 Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa	31
3.1.7 Pendapatan Transfer Desa	34
3.1.8 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.....	37
3.1.9 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.....	38
3.1.10Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam.. ..	39
3.2 Tinjauan Praktek	
3.2.1 Perencanaan Pembangunan Desa	42
3.2.2 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)	46
3.2.3 Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	48

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

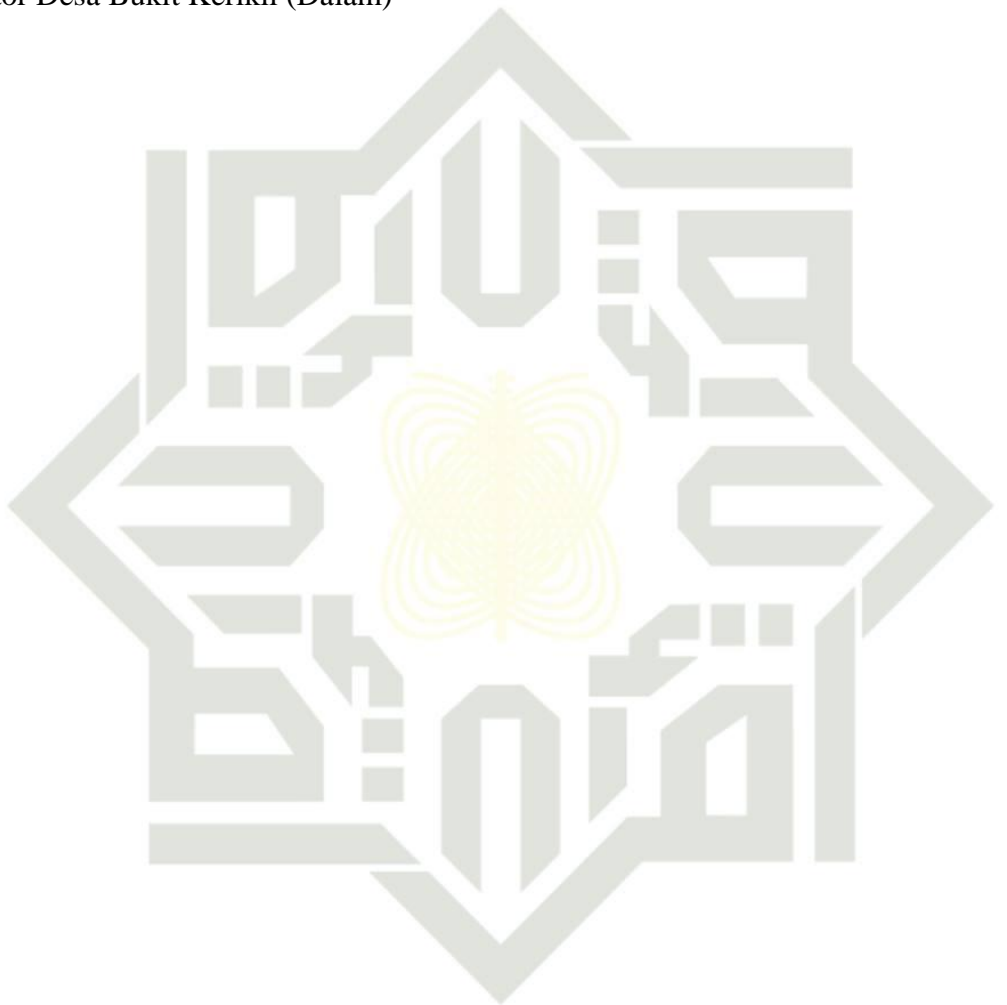
Tabel 1.	Data Perkembangan Dana Desa Tahun 2015-2019.
Tabel 2.	Dana Desa Provinsi Riau Tahun 2015-2019.
Tabel 3.	Data Pembangunan fisik Desa Bukit Kerikil Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis tahun 2019.
Tabel 4.	Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Bukit Kerikil.
Tabel 5.	APBDes Desa Bukit Kerikil.
Tabel 6.	LRA Desa Bukit Kerikil

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Azaz-azaz Pengelolaan Keuangan Desa

Gambar 2. Kantor Desa Bukit Kerikil (Luar)

Gambar 3. Kantor Desa Bukit Kerikil (Dalam)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya dana desa sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat desa, terutama dengan lahirnya Undang-Undang Tentang Desa. Sebelumnya Undang-Undang tentang desa bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia, pada Tahun 1979 Undang-Undang No. 5 tentang Pemerintah Desa yang menyeragamkan susunan kelembagaan dan organisasi desa. Kedudukan desa berada di bawah kecamatan kemudian diperkuat dengan adanya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, namun Undang-Undang tersebut tidak berlangsung lama, kemudian digantikan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa : desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberi harapan baru untuk masyarakat desa. Undang-Undang yang ditanda tangani langsung oleh mantan Presiden ke-6 Republik Indonesia, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini membuat desa berperan penting bagi otonomi daerah, dan kebijakan dana desa serta adanya perubahan pola yang awalnya sentralisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi desentralisasi ini tentu saja menjadi tantangan baru bagi aparatur desa maupun masyarakat desa. Beberapa tujuan yang terdapat didalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 4 diantaranya adalah meningkatkan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan umum, mewujudkan desa yang dapat memelihara kesatuan sosial, meningkatkan ekonomi masyarakat Desa. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang meliputi kewenangan berskala asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta pemerintahan kabupaten/kota, dan kewenangan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan. (DetikNews.com)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Pengalokasian dana desa yang bersumber dari APBN dimulai tahun anggaran 2015. Pengelolaan keuangan desa menjadi pusat perhatian masyarakat khususnya terkait dengan akuntabilitas dan transparansi, dalam hal pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam suatu siklus yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban. Data perkembangan Dana Desa Tahun 2015-2019 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Data Perkembangan Dana Desa Tahun 2015-2019

TAHUN	JUMLAH DESA	JUMLAH DANA DESA (Rp)
2015	74.093	Rp. 20,67 triliun
2016	74.754	Rp. 46,98 triliun
2017	74.910	Rp. 60 triliun
2018	74.910	Rp. 60 triliun
2019	74.954	Rp. 70 triliun
TOTAL		Rp. 257,65 triliun

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan (PMK, 2020)

Pada Tahun 2015, dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan untuk 74.093 desa sebesar Rp. 20,67 triliun. Di sisi lain, jumlah desa meningkat dari tahun 2016 yakni sebanyak 74.754 desa dengan kucuran anggaran yang digelontorkan sebesar Rp. 46,98 triliun. Sejak digelotorkannya dana desa pada tahun 2015 hingga 2019, terdapat perbedaan jumlah desa yang tersebar sebagai penerima dana desa. Pada tahun 2017 dana desa digelontorkan sebesar Rp. 60 triliun untuk 74.910 desa. Lalu pada tahun 2018 dana desa juga digelontorkan sebesar Rp. 60 triliun untuk 74.910 desa, kemudian pada Tahun 2019 dana desa sebesar Rp. 70 triliun untuk 74.954 desa. (Peraturan Menteri Keuangan, PMK : 2020)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dana desa yang telah digelontorkan oleh pemerintah sejak tahun 2015 – 2019 mencapai angka yang fantastis yaitu sebesar Rp.257 Trilyun dengan total 74,954 Desa (detiknews, 2019). Jumlah alokasi dana desa tersebut membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki tugas yang cukup besar dalam aktivitas pengawasannya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Fenomena semakin besar dana yang dikuncurkan akan membuat kemungkinan besar pula penyalahgunaannya. Hal ini dibuktikan dengan maraknya pemberitaan diberbagai media terkait dengan penyalahgunaan dana desa, bahkan menurut *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mencatat korupsi Dana Desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Catatan ICW, korupsi dana desa pada tahun 2015 mencapai 22 kasus. Kasus tersebut meningkat menjadi 48 kasus pada tahun 2016 dan naik lagi menjadi 96 dan 98 kasus pada tahun 2017 dan 2018. Dengan kata lain korupsi dana desa selama 2015-2018 mencapai 252 kasus. seiring peningkatan tersebut ICW mencatat jumlah kepala desa yang terserak kasus korupsi juga ikut naik, catatan mereka, sebanyak 214 kepala desa tersangkut kasus korupsi selama tahun 2015-2019 (Egi Primayoga, 2019).

Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atau peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatanm pelaporan, dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa.

Peningkatan dana desa signifikan dari tahun 2015 – 2019 memberikan pengaruh yang positif terhadap ketersediaan dana desa untuk pembangunan dana desa untuk pembangunan desa-desa diseluruh Indonesia, khususnya yang desa-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa di Provinsi Riau. Adapun data perkembangan Dana Desa Provinsi Riau Tahun 2015 – 2019 seperti pada tabel berikut :

Tabel 2. Dana Desa Provinsi Riau Tahun 2015-2019

(Dalam Ribu Rupiah)

NO	KABUPATEN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kab. Bengkalis	38,177,892	85,634,628.	108,168,870	118,033,975	131,071,696
2	Kab. Indragiri Hilir	54,910,380	123,119,476	156,525,314	146,756,324	168,394,033
3	Kab. Indragiri Hulu	48,532,612	108,844,466	138,490,141	140,433,302	160,181,885
4	Kab. Kampar	67,249,511	151,159,631	192,408,524	185,162,993	209,669,588
5	Kab. Kuantan Singingi	58,239,832	130,621,773	166,211,742	153,076,959	172,266,776
6	Kab. Pelalawan	29,612,340	66,400,280	84,403,526	90,154,697	104,309,775
7	Kab. Rokan Hilir	46,037,731	102,916,528	130,582,811	126,860,825	143,289,390
8	Kab. Rokan Hulu	39,425,763	88,205,480	112,016,303	120,306,632	139,861,061
9	Kab. Siak	34,379,883	77,108,631	97,934,922	97,135,442	111,240,674
10	Kab. Kepulauan Meranti	29,081,021	65,267,323	82,563,772	84,050,804	96,400,996
	TOTAL	445,646,965	999,278,216	1,269,305,925	1,261,971,953	1,436,640,844

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan (PMK, 2020)

Dari tabel diatas, Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten yang memiliki porsi dana lebih rendah dari Kabupaten Kampar, terbesar di Riau.

Hal ini di karenakan jumlah desa yang ada di Kabupaten Bengkalis lebih sedikit dibandingkan Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis mempunyai 136 desa sedangkan Kabupaten Kampar mempunyai 242 desa. Pada tahun 2015 Kabupaten Bengkalis memiliki Rp. 38,177,892,000.00 dan meningkat menjadi Rp. 131,071,696.00 pada tahun 2019. Ketersediaan dana desa tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pembangunan desa, baik pembangunan fisik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun pemberdayaan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan yang paling penting dilakukan pengawasan dalam pengelolaan dana melalui tata kelola keuangan transparan dan akuntabel. (Peraturan Menteri Keuangan, PMK : 2019).

Melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan komitmen pemerintahan kabinet kerja yang tertuang pada butir Nawacita yang berbunyi “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”, telah memberi arah dan paradigma baru dalam pembangunan desa diseluruh Indonesia. Menteri Dalam Negri, Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa desa tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, namun juga menjadi subjek pembangunan. Hal ini juga tercermin dari penerapan azaz rekognisi dan subsidiaritas dalam pengaturan desa.

Terkait dengan penjelasan diatas maka penulis bertujuan melakukan penelitian di Desa Bukit Kerikil Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis, adapun pembangunan desa di Desa Bukit Kerikil kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis 2019, dapat dilihat dari tabel data pembangun berikut.

Tabel 3

Data pembangunan fisik Desa Bukit Kerikil Kecamatan Bandar

Laksaman Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

No	NAMA KEGIATAN	VOLUME	PAGU	KETERANGAN
			(Rp)	
	Normalisasi Kanal (A) Belakang SMA	4 m x 3000 M	76.192.000,00	Sudah Terealisasi
	Perawatan jl, kelapa 2	6 m x 4000 m	34.656.500,00	Sudah Terealisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	Rehap Gorong - Gorong + tanah timbun, Gg. Kubu	3 Buah + 1,5 m x 1,5 m x 3 m	11.086.000,00	Sudah Terealisasi
	Peningkatan Jl. Pinangan	4 x 500 M	51.919.500,00	Sudah Terealisasi
	Lanjutan Pembangunan Gor	1 Unit	200.000.000,00	Sudah Terealisasi
	Peningkatan Jalan Jl Bambu Kuning	58 M X 4 M	14.675.000,00	Sudah Terealisasi
	Pembangunan Parit Beton Jl. Bambu Kuning	90 M	59.640.000,00	Sudah Terealisasi
	Pembuatan Pembangunan Saluran Air	2 X 2 X 1000 M	31.636.500,00	Sudah Terealisasi
	Lanjutan Penimbunan Jln Gotek	750 x 4 x 0.25	99.913.000,00	Sudah Terealisasi
	Lanjutan Penimbunan Jln Kaslam	315 x 4 x 0.25	50.672.000,00	Sudah Terealisasi
10	lanjutan pengerasan jl. Manggis		41.000.000,00	Sudah Terealisasi 30%
JUMLAH			671.390.500,00	

Sumber : keuangan Desa Bukit Kerikil

Dari data di atas bisa dilihat bahwa masih ada program kerja yang belum terealisasi sesuai dengan target yang telah direncanakan. Dari beberapa program pembangunan semenisasi jalan yang direncanakan hanya separuh yang terealisasi, dan pembangunan Lanjutan pengerasan Jl.Manggis dengan biaya Rp. 41.000.000,00 belum terealisasi secara maksimal hanya 30% yang terlaksana. Hal ini menunjukkan masih kurang maksimalnya program pembangunan yang ada di Desa Bukit Kerikil Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis.

Pembangunan di desa akan berhasil jika dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat secara optimal melalui proses pemberdayaan. Kontribusi masyarakat

baik itu ide, tenaga dan harta sangat diperlukan untuk perbaikan pembangunan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat menuju kesejahteraan bersama.

Berkaitan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tentunya tidak lepas dari kemampuan pemerintah desa untuk mengelola APBDes sesuai kebutuhan. Hal ini merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong *good governance*. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Laporan keuangan desa ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang sering disebut sebagai tata kelola keuangan desa. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Adanya tata kelola keuangan desa yang dilakukan dengan baik tentunya akan berdampak positif terhadap system pemerintahan desa, serta terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kemajuan desa yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DI DESA BUKIT KERIKIL KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA KABUPATEN BENGKALIS**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, dapatlah dirumuskan suatu perumusan masalah yaitu : **Bagaimanakah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bukit Kerikil Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis?**

1.3 Tujuan Penelitian

Seiring dengan perumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas serta pengelolaan Dana Desa di Bukit Kerikil Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian Dari Penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi atau masukan bagi pemerintah desa untuk mengelola Dana Desa yang lebih baik di Desa Bukit Kerikil Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis.
2. Sebagai bahan informasi atau pedoman bagi pemerintah Desa Bukit Kerikil dalam melaksanakan Tugas-tugasnya.
3. Hasil Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan bagi pihak yang memerlukan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penelitian ini berguna bagi peneliti berikutnya yang mau mengadakan penelitian yang sama.

1.5 Metode Penelitian

a. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Bukit Kerikil Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis. Penelitian dimulai dari bulan Januari s.d Maret 2020.

b. Jenis dan Sumber Data

1) Data Primer

Data yang langsung penulis peroleh dari objek penelitian berupa wawancara langsung dengan kepala desa, tim alokasi dana desa dan masyarakat mengenai prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa di Bukit Kerikil guna mengumpulkan data mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Bukit Kerikil Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis.

2) Data Sekunder

Data yang di peroleh dari kantor Desa Bukit Kerikil tahun 2019. Dimana data tersebut berupa laporan-laporan/buku-buku/catatan-catatan yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti, diantaranya dari segala kegiatan yang berkaitan dengan analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa yang meliputi Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2019, RKPDesa, Laporan Realisasi (LRA), dan Rekapitan Pembangunan Tahun 2019.

1.6 Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada responden/tim Alokasi Dana Desa dan bersifat mendalam serta terbuka untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyelesaian tugas akhir.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan melihat langsung data-data yang sudah ada dan tersedia di lokasi penelitian yaitu Kantor Desa Bukit Kerikil Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis. Data-data yang sebagian besar sudah ada dilokasi penelitian antara lain adalah Laporan APBDesa, RKPDesa, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Rekapitan Pembangunan Tahun 2019.

1.7 Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan membandingkan objek yang sudah diteliti dengan menganalisa dan mengevaluasi data tersebut berdasarkan teori-teori yang sudah diperoleh, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan disajikan dalam bentuk penelitian berdasarkan tata cara ilmiah.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi menjadi empat bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini berisikan mengenai gambaran umum desa Bukit Kerikil Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari sejarah singkat desa beserta struktur organisasi desa dan jenis kegiatan usaha yang dijalankan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang meliputi pengertian Dana Desa, desa dan undang-undang desa, azaz pengelolaan keuangan desa, akuntansi desa serta data anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

BAB IV : PENUTUP

Bab terakhir merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan kemudian mencoba memberi saran yang kiranya bermanfaat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1 Sejarah Desa

Desa Bukit Kerikil adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis dengan luas wilayah 6000 Ha. Tinggi Pusat Pemerintahan dari permukaan laut 5 m, dengan suhu kisaran 35°C dan bentuk wilayah 90% datar sampai dengan berombak.

Desa Bukit Kerikil terdiri dari 4 Dusun 8 Rukun Warga (RW), 27 Rukun Tetangga (RT). Dimana jarak antara pusat Pemerintahan dengan RT terjauh ± 15 km, sedangkan jarak pusat pemerintahan dengan Ibu Kota Provinsi (Pekanbaru) ± 260 km.

2.2 Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Bukit Kerikil sampai dengan akhir bulan Desember 2017 adalah **6008** jiwa terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak **3072** jiwa dan jumlah penduduk Perempuan **2936** jiwa, hal ini menunjukkan bahwa terdapat keseimbangan yang relative, sedangkan pertumbuhan penduduk Bukit Kerikil setiap tahun menunjukkan angka yang relative kecil. Jika dibandingkan dengan luas wilayah Kecamatan maka kepadatan penduduk kecamatan Bandar Laksamana adalah 175 jiwa/km². Angka kepadatan penduduk ini menunjukkan bahwa Bukit Kerikil termasuk dalam wilayah memiliki kepadatan penduduk yang sedang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Masyarakat Bukit Kerikil memiliki mata pencaharian sebagai Petani, Nelayan, Pedagang dan Pegawai dan sebagian kecil bergerak dibidang Jasa.

2.3 Infrastruktur

Infrastruktur merupakan prasarana yang dapat menunjang berbagai aktifitas kehidupan, terutama aktifitas social ekonomi. Karena begitu pentingnya infrastruktur ini, maka pemerintah merasa perlu berbagai upaya peningkatan pembangunan infrastruktur sampai ke Bukit Kerikil.

Sehubungan dengan itu seperti halnya dengan desa-desa lain, Bukit Kerikil juga telah mengalami berbagai peningkatan pembangunan infrastruktur dari tahun ketahun. Peningkatan Jalan, Pembangunan Jembatan, Sarana Penerangan, Telekomunikasi dan lainnya, merupakan bukti nyata adanya pembangunan Infrastruktur.

Bahkan dengan peningkatan jalan lintas Sungai Pakning-Pekanbaru dan jalan Sungai Pakning-Dumai (sampai saat ini masih dalam tahap pembangunan) serta pembangunan penyebrangan (Roro) Sungai Pakning-Bengkalis adalah merupakan Infrastruktur yang sangat strategis dan potensial bagi perkembangan perekonomian masyarakat Desa Bukit Kerikil.

Karena dengan terbukanya jalan lintas tersebut sedikit banyaknya merupakan dampak peningkatan perekonomian bagi masyarakat Desa Bukit Kerikil ini semakin dapat dirasakan.

2.4 Pendidikan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Merupakan dambaan bagi setiap masyarakat Desa Bukit Kerikil, Pembangunan Sekolah Dasar Madrasah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(MDA) dan fasilitas pendidikan lainnya bukti nyata perhatian Pemerintah terhadap Pembangunan di Desa ini.

Untuk menciptakan masyarakat Desa Bukit Kerikil yang berilmu pengetahuan, Masyarakat Desa yang ingin melanjutkan Pendidikan SMP dan SLTA yang telah tersedia di Desa Bukit Kerikil.

2.5 Industri Rumah Tangga

Tertutupnya Bukit Kerikil dari daerah luar (terutama pusat-pusat perekonomian menyebabkan potensi ekonomi desa ini belum tergali secara maksimal. Karena walaupun ada Produksi yang dihasilkan baik itu hasil pertanian atau industri belum dapat dipasarkan ke daerah luar.

Tetapi dengan jalur-jalur transportasi dan komunikasi yang merupakan urat nadi perekonomian yang menghubungkan Desa dengan berbagai kota lainnya seperti Pekanbaru, Dumai, Selat Panjang dan Batam menyebabkan Mobilitas masyarakat semakin meningkat. Dengan demikian terjadi berbagai transaksi ekonomi pada akhirnya akan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan berbagai hasil produksi pertanian maupun industri.

Di Desa Bukit Kerikil terdapat Industri Kerajinan Rumah Tangga berupa usaha pembuatan Tahu dan pembuatan Tempe, Industri ini merupakan usaha yang potensial untuk dikembangkan di Desa Bukit Kerikil.

2.6 Keadaan Ekonomi

a) Pertanian

Jenis Tanaman :

1. Perkebunan : 5555 ha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Terong	: 1,3	ha
3. Jagung	: 2	ha
4. Kacang kedelai	: 0,5	ha
5. Ubi kayu	: 1	ha
6. Cabe	: 5	ha
7. Mentimun	: 2	ha

b) Peternakan

Jenis Ternak :

1. Sapi	: 200	ekor
2. Ayam kampung	: 8400	ekor
3. Bebek	: 200	ekor
4. Kambing	: 130	ekor
5. Domba	: 6	ekor
6. Angsa	: 48	ekor
7. Kelinci	: 32	ekor
8. Babi	: 9	ekor
9. Lain-lain	: -	

c) Perikanan

1. Tambak ikan	: 86	ha
----------------	------	----

2.7 Potensi Umum

a) Batas Wilayah

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Gurun Panjang	Bukit Kapur
Sebelah selatan	Desa Tasik Serai	Pinggir
Sebelah barat	Bukit Kayu Kapur	Bukit Kapur
Sebelah timur	Desa Tanjung Leban	Bukit Batu

b) Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Luas pemukiman35..... ha/m2
Luas persawahan ha/m2
Luas perkebunan5555..... ha/m2
Luas kuburan2..... ha/m2
Luas pekarangan ha/m2
Luas taman ha/m2
Perkantoran7..... ha/m2
Luas prasarana umum lainnya 6.....ha/m2
Total luas ha/m2

c) Iklim

Curah hujan Mm
Jumlah bulan hujan3..... bulan
Kelembapan
Suhu rata-rata harian	37 °C
Tinggi tempat dari permukaan laut mdl
.....	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Susunan Organisasi Pemerintahan

NAMA-NAMA APARAT DESA :

Kepala Desa	: NURDIN
Sekretaris Desa	: EKO SARWONO
Kepala Seksi Pemerintahan	: RIATNO
Kepala Seksi Pelayanan	: WARSINO ALDI
Kepala Seksi Kesejahteraan	: SUTIKNO MANALU
Kepala Urusan Perencanaan	: DARMA SUKMA BINAWAN
Kepala Urusan Keuangan	: EVA SULINAH
Kepala Urusan Umum	: GUNAWAN
Kepala Dusun :	
1. Dusun I Bagan Makmur	: EDY SUTRISNO
2. Dusun II Suka Maju	: SUNARDI
3. Dusun III Suka Mulya	: NERIADI OYOT PRAYOGA
4. Dusun IV Suka Damai	: M. HANAFI



NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA (BPD) :

Ketua : EKO MARWANTO

Wakil Ketua : PAISO

Sekretaris : HERIS HERIANTO

Anggota :

1. RUSAM
2. KOHARI
3. YUSUF SAUT PANGARIBUAN
4. NURHIDAYAT
5. SUDIARTO
6. RUDIANTO

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Bukit Kerikil Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis yaitu :

1. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Bukit Kerikil yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarahkan. Namun pada pelaksanaannya dilapangan belum bisa dikatakan telah berjalan sesuai yang diharapkan, misalnya dari sisi perencanaan Dana Desa di Desa Bukit Kerikil sama sekali tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
2. Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Bukit Kerikil Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis cenderung kurang transparan, hal tersebut di karenakan tidak adanya papan pengumuman mengenai setiap pengumuman mengenai setiap penggunaan Dana Desa (DD) sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui setiap dana yang digunakan.
3. Desa Bukit Kerikil Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis sudah menerapkan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tidak adanya motivasi seperti kompensasi dari pemerintahan desa terhadap para bawahannya ataupun pegawainya yang melaksanakan Pengelolaan Dana Desa sehingga banyak dari pengelolaan yang tidak semangat dalam melaksanakan Pengelolaan Dana Desa tersebut seperti pengawasan yang kurang dilaksanakan dengan baik dilapangan sehingga membuat banyak dari pembangunan yang terbengkalai dan pengelolaan keuangan yang dilakukan tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

4.2 Saran

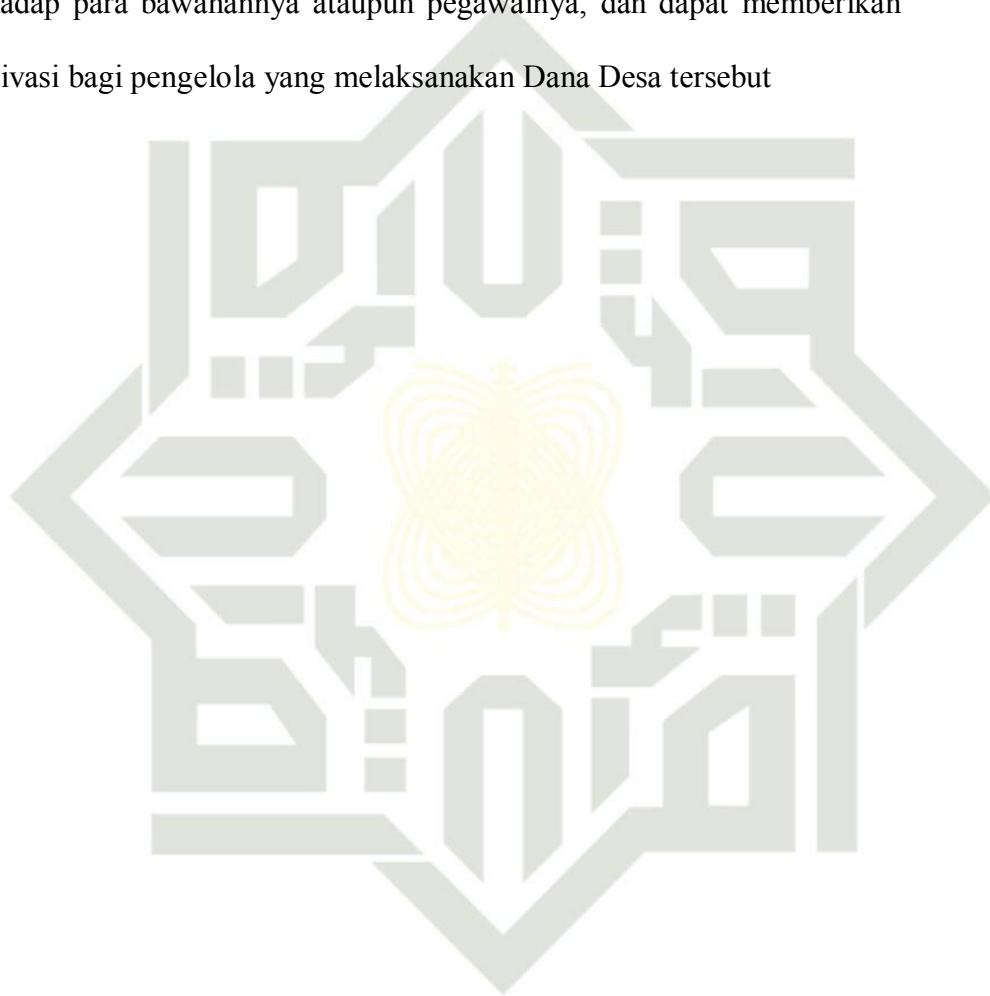
Mengacu pada penelitian yang penulis lakukan, dan berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka penulis mencoba untuk memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi Desa Bukit Kerikil Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis yaitu :

1. Disarankan kepada Tim Pengelola Dana Desa (DD) desa Bukit Kerikil agar menghitung dan mengukur dalam menggunakan Dana Desa untuk yang sangat esensial dan sesuai perencanaan pembangunan infrastruktur desa yang sangat dibutuhkan masyarakat desa dan pemerintah ataupun masyarakat agar selalu mengawasi dan tidak terjadinya kecurangan dari Pengelolaan Dana Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Diharapkan kepala desa untuk memberikan informasi atas penggunaan dana desa kepada masyarakat, sehingga akan meminimalakan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa (DD).
3. Disarankan kepada Pemerintah Desa Bukit Kerikil agar lebih peka terhadap para bawahannya ataupun pegawainya, dan dapat memberikan motivasi bagi pengelola yang melaksanakan Dana Desa tersebut



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 282
- Al-Qur'an Surah Al-Muddassir Ayat 38
- Al-Qur'an Surah Al-Qiyamah Ayat 36
- Hamzah, Ardi. 2015. *Tata Kelola Pemerintah Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris*. Surabaya: Penerbit Pustaka
- BPKB. 2015. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Palembang: BPKB)
- Badan Permusyawaratan Desa. Wawancara, Desa Bukit Kerikil Kecamatan Laksamana Kabupaten Bengkalis
- Eko, S. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta : Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)
- Edi Indrizal Tipologi Desa Di Indonesia
- Hoesada, J. 2014. *Komite standar Auntansi Pemerintah ((Ksap)*. Jakarta.
- <http://birokrasi.kompasiana.com/2015/02/12/undang-undang-baru-harapan-baru-masyarakat-desa--701390.html>
- <https://www.scribd.com/doc/74351414/8/Anggaran-Pendapatan-dan-Belanja-Desa-APB-Desa>
- Isnail, Muhammad, Ari Kuncara Windagdo, dan Agus Widodo. 2016. "Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume, Nomor 2, februari 2016*.
- Jailani Imam. *Amrusi DKK, Hukum Tata negara Islam*, Surabaya: IAIN Sunana Ampel Press
- Khaddafi Muammar, dkk. 2017. *Akuntansi Syariah*. Medan : CV. Madenatera
- Kepala Urusan Keuangan Desa. Wawancara, Desa Bukit Kerikil Kecamatan Laksamana Kabupaten Bengkalis
- Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementrian Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006

Permen No 113 2014

UU No 6 Tahun 2014

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru.

Wajaya, David. 2018. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Gava Media.

Wahjudin Sumpeno 2011. *Perencanaan Desa Terpadu Cetakan Kedua*. Penerbit Read

www.jdih.kemenkeu.go.id, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 226/pmk.07/2017

www.jdih.kemenkeu.go.id, Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota 2015-2019



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembaran Panduan Wawancara

PANDUAN WAWANCARA

“AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DI DESA BUKIT KERIKIL KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA KABUPATEN BENGKALIS”

Tanggal : 31 Maret 2020

Tempat : **Desa Bukit Kerikil Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis**

1. Bagi hasil pajak dan Retribusi Anggaran : Rp. 105.341.453,00

Terealisasi : Rp. 37.176.619,00 Sehingga terdapat sisa Rp. 68.164.834,00
mengapa?

Jawaban: Karena ada perubahan anggaran ada defisit anggaran.

Sesuai dengan Perbup perubahan pagu induktif transfer pajak/retribusi tahun anggaran 2019

2. Di lihat dari belanja desa di sub BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA dengan anggaran Rp. 2.557.279.254,70 namun yang terealisasi yaitu sebesar Rp. 2.299.072.830,00, sehingga terdapat sisa Rp.258.206.424,70, mengapa?

Jawaban:

- Adanya kegiatan yang tidak terealisasi dikarenakan adanya penghematan belanja
- karena akan diadakannya kegiatan MTQ tingkat kecamatan pada tahun 2020 yang akan membutuhkan banyak dana sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan yang tidak terealisasi pada tahun 2019, di ubah kegiatannya untuk kegiatan MTQ tingkat kecamatan tahun 2020

3. Masih dengan belanja desa di bagian sub BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA terdapat anggaran Rp. 1.806.390.557,30 namun yang terealisasi sebesar Rp. 1.575.617.256,00 terdapat kekurangan sebesar Rp. 230.773.301,30 mengapa?

Jawaban: Kegiatan belum dilaksanakan, dan akan dilaksanakan pada anggaran tahun 2020

4. Realisasi pada BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN terdapat kekurangan sebesar Rp. 127.841.453,00 dengan anggaran Rp. 769.400.822,00 sedangkan terealisasi Rp.641.559.369,00 atau sebesar 83% mengapa?

Jawaban: Adanya sisa belanja yang belum terealisasi, dan akan dimasukkan pada belanja APEBEDESA tahun anggaran 2020 dan akan direalisasikan pada tahun anggaran 2020.

5. Selain itu realisasi sub BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT memiliki realisasi yang sangat minim yang mana anggaran di rencanakan sebesar Rp. 31.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.000.000,00 atau terealisasi sebesar 35% mengapa?

Jawaban: Karena Desa mengeluarkan uang sesuai kebutuhan dan sisa belanja akan dimasukkan ke silpa(sisa lebih perhitungan anggaran).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2 : Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 113 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 106 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTRI DALAM NEGERI TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengurusururan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
14. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

15. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
16. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
18. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
19. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
20. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
21. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- 1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- 2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- 1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- 2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

- 3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 4

- 1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
- 2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Pasal 5

- 1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- 2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 6

- 1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- 2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- 2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV

APBDesa

Pasal 8

- 1) APBDesa, terdiri atas:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- 2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- 3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- 4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan

Pasal 9

- 1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- 2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.
- 3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- 4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa.
- 5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- 7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf di antara lain hasil pungutan desa.

Pasal 10

- 1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
- 2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
- 3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- 4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
dan
- b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 11

- 1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.
- 2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagian Kedua

Belanja Desa

Pasal 12

- 1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- 2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.
- 2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- 3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
 - a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.

Pasal 14

- 1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- 2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

Pasal 15

- 1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- 2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. alat tulis kantor;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor desa;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium narasumber/ahli;
 - m. operasional Pemerintah Desa;
 - n. operasional BPD;
 - o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

- 3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- 4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

- 1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- 2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 17

- 1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- 2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- 3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- 5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota.
- 6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 18

- 1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- 3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- 4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- 6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- 7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 19

- 1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri dari
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Desa.
- 2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- 4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- 5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- 7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pasal 20

- 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- 2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- 3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 21

- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- 2) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- 3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 4)) Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 22

- 1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- 2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- 3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- 4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Pasal 23

- 1) Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- 3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 24

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 25

- 1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- 3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 26

- 1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- 2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- 3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- 2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- 3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Pasal 28

- 1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- 2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 29

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi

Pasal 30

- 1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

- 2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- 3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 31

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1) Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 2) Perubahan APBDDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 3) Tata cara pengajuan perubahan APBDDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDDesa.

Pasal 34

- 1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDDesa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

Bagian Ketiga

Penatausahaan

Pasal 35

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- 2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 36

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 ayat (2), menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. buku Bank.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- 2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- 4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban

Pasal 38

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 39

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 40

- 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 42

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 29 huruf a dan huruf b, Pasal 37 dan Pasal 38 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
- 2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dibundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2014.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttu

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR

2093.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO

NIP. 19590203 198903 1 001.

UIN SUSKA RIAU

Lampiran 2 : Foto Kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2. Kantor Desa Bukit Kerikil (luar)



Gambar 3. Kantor Desa Bukit Kerikil (dalam)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Duwwi Fitriana, lahir di Rantau Prapat, 16 Desember 1998. Ayahanda bernama Ahmad Faridul dan Ibunda bernama Lela. Penulis merupakan anak kedua dari lima bersaudara yakni Yanda Syari Pohan, Nurhayana, Ahmad Ridho, dan Aulia Rahmadhani. Jenjang pendidikan dimulai dari SDN 26 Bukit Kerikil, Bukit Batu, Bengkalis dari tahun 2005-2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 5 Bukit Batu dari tahun 2011-2014, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Bukit Batu dari tahun 2014-2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan D-III Akuntansi.

Dengan berkat Rahmat Allah SWT, Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Desa Bukit Kerkil Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis”** dibawah bimbingan ibu Faiza Mukhlis, SE, M.Si, Ak,. Pada tanggal 19 Mei 2020 dipanggil untuk mengikuti ujian munaqasah dan dinyatakan lulus dengan nilai sangat memuaskan dan menyandang gelar Ahli Madya (A.Md).